



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAPORAN

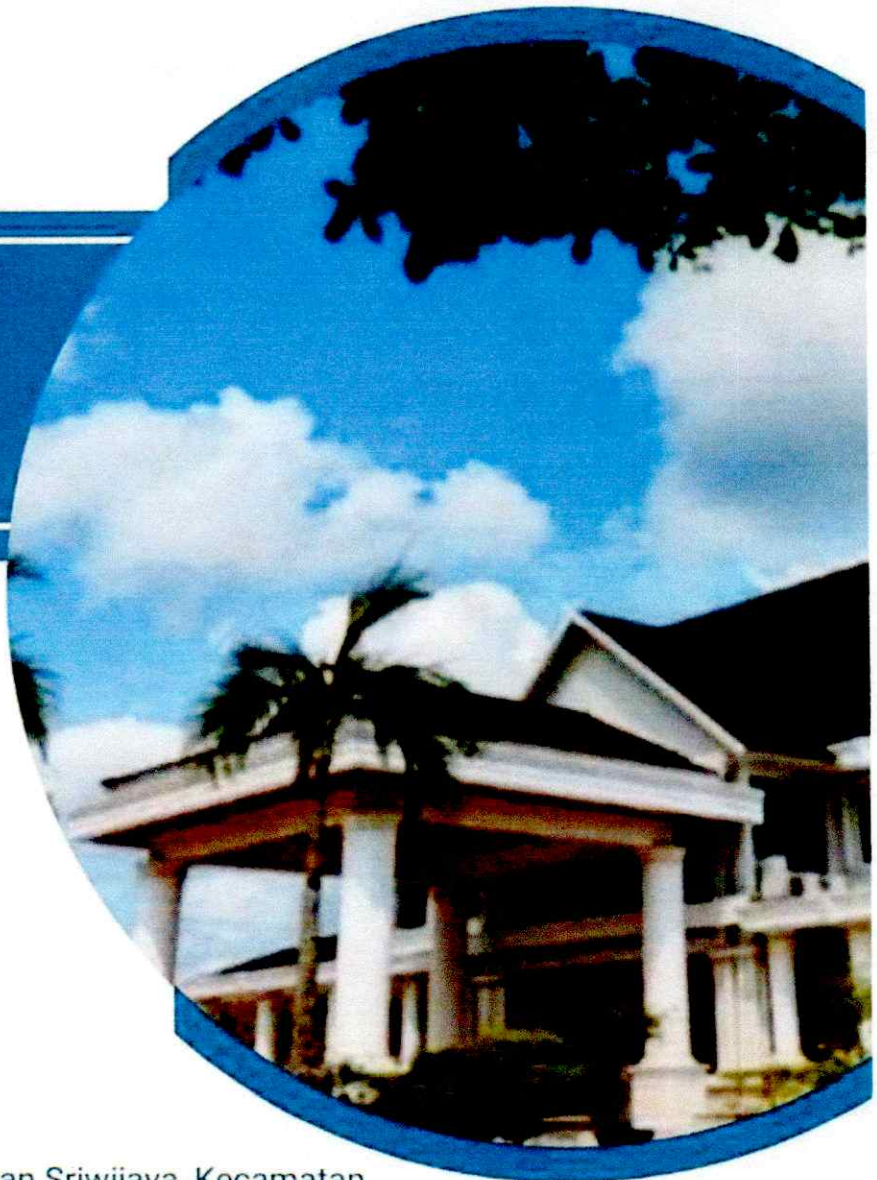
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2025

SEKRETARIAT
DAERAH

2025

KUALA TUNGKAL,
Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah turut dijabarkan pasal empat (4) bahwa Sekeratriat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Penyusunan Laporan Klnerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Kuala Tungkal,

2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERMAYAN, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19820411 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029.

Dari Hasil analisa atas pelaksanaan kinerja tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum dinyatakan “sangat baik”. Dari 16 (enam belas) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tiga (3) sasaran, didapati sebanyak empat (4) indikator kinerja dinyatakan “sangat baik” dan dua belas (12) indikator dinyatakan “baik”.

Pencapaian kinerja ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tampak pada rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 94,43% dan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 101,32%. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh pada masa mendatang yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyajian data serta penguatan komitmen, sehingga tercapai integrasi antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemenuhan dan meningkatkan sumber daya manusia di setiap bagian di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Memperbaiki cara menetapkan realisasi agar selaras dengan operasional perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bagian yang berubah diakibatkan perubahan kebijakan perundang-undangan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan serapan anggaran sebesar 91,22. Realisasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran kinerja sebesar 101,32% maka menunjukkan adanya efektivitas kinerja terhadap penggunaan anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat	2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
3. Sumber Daya Manusia	5
C. Sistematika Penulisan	5
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	7
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
C. Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah	8
Tabel II.2 : Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	10
Tabel II.3 : Anggaran pada sasaran Sekretariat Daerah	11
Tabel II.4 : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024	18
Tabel III.A : Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	21
Tabel III.1-1 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efesien dan bertanggungjawab.....	16
Tabel III. 1-2 : Predikat Tingkat APIP	17
Tabel III.1-3 : Realisasi Kinerja Tahun 2025	17
Tabel III. 1-4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	17
Tabel III. 1-5 Capaian Kinerja Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak lanjuti	18
Tabel III. 1-6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan sebelumnya.....	18
Tabel III. 1-7 Capaian Kinerja Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B).....	19
Tabel III. 1-8 Capaian Kinerja Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Minimal Baik..	19
Tabel III. 1-11 Capaian Kinerja Kematangan Perangkat Daerah.....	22
Tabel III. 2-1 Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga ...	23
Tabel III. 2-2 Interval Nilai LPPD	24
Tabel III. 2-3 Realisasi Kinerja Tahun 2025	24
Tabel III. 2-4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	25
Tabel III. 2-5 Capaian Kinerja Peringkatprestasi MTQ Tingkat Provinsi	25
Tabel III. 2-6 Capaian Kinerja Hibah Bidang Keagamaan dan Sosial yang tersalurkan	25
Tabel III. 2-7 Capaian Kinerja Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan dan Perundang-undangan	26
Tabel III. 2-8 Perda Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	27

Tabel III. 2-10 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Hukum	32
Tabel III. 2-11 Capaian Kinerja Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	33
Tabel III. 3-1 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	34
Tabel III. 3-2 Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Sektor Perekonomian	34
Tabel III. 3-3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	35
Tabel III. 3-4 Capaian Kinerja Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	35
Tabel III.3-5 Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan LPPK Tepat waktu	35
Tabel III. 3-6 Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang/jasa melalui LPSE	36
Tabel III. 3-7 Capaian Kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan berkelanjutan	38
Tabel. III.B.1 Realisasi Program/Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat T.A.....	40
Tabel. III.B.2 Realisasi Anggaran Perbagian Sekretariat Daerah.....	42
Tabel. III.B.2 Tingkat Efisiensi Sekretariat Daerah	43
Diagram Perbandingan Tahun Anggaran 2025 dengan sebelumnya	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan SAKIP mencakup 6 (enam) unsur, yakni: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya



pemerintahan yang baik dan terpercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Instansi Pemerintah akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif, terbuka, dan dipercaya masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah sebagai unsur Penunjang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretariat Daerah selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam semua aspek, termasuk diantaranya penerapan good governance. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Untuk mengetahui lebih jelas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, dijabarkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

A. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4. Bagian Kerjasama, terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional

B. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari atas Kelompok jabatan fungsional
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional
3. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional

C. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:

1. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Protokoler; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
2. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional;
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional;
4. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional.

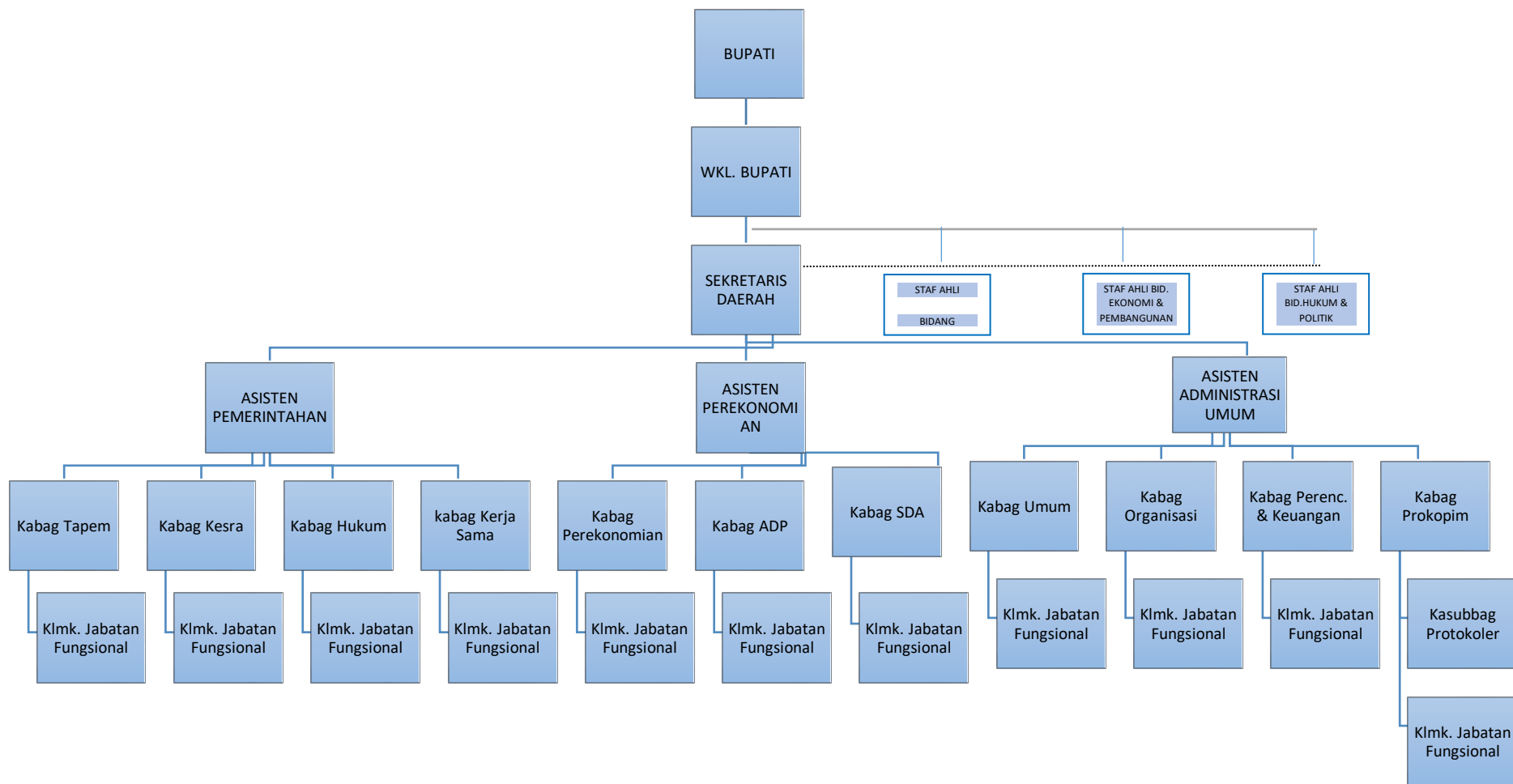
D. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

E. Staf Ahli

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JAUNG BARAT





3. Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada bulan Desember 2024 Jumlah PPPK sebanyak 6 orang, dengan pegawai PPPK laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan 3 orang, serta jumlah PNS tercatat sebanyak 107 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan 28 orang.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Berdasarkan Golongan

Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I				Total
A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
3	9	5	1		32	12	12	20	2			11					107

Sumber : Bagian Umum 2024

Tabel 1.2

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	DIV	D1-D3	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
	13	56	5	6	25	1	1	124

Sumber : Bagian Umum 2024

Adanya hubungan komunikatif dan kekeluargaan yang erat antar pegawai di Sekretariat Daerah semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis organisasi, dan sistematika penyajian.



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025 serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disebut Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yakni : **“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif.**

Guna mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tiga misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari visi misi tersebut, secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman kepada 1 (satu) misi yaitu misi ke-2 Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu :

- ❖ Misi ke – 2 (dua) yaitu : **“Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public”**

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai misi Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut ;

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/Lembaga
3. Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jumlah Sasaran Strategis Tahun 2025 sebanyak tiga (3) Sasaran dengan limabelas (15) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dilakukan perubahan setelah penetapan APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta adanya perubahan RPJMD. Berikut adalah sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	80,01 (A)	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	86	Bag. Umum
		Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu Pelayanan Minimal Baik (B)	34	Bagian Organisasi



No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	40	Bagian Organisasi
		Nilai kematangan Perangkat Daerah	36	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	80	Bagian Protokol
2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Skor LPPD	2,644	Bag. Tapem
		Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar	Bag. Kesra
		Persentase bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran	100%	Bag. Kesra
		Persentase Produk Hukum daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	Bag. Hukum
		Indeks Reformasi Hukum	83	Bag. Hukum
		Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	100%	Bag. Kerjasama
3.	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, dan Optimiliasi pengelolaan sector ekonomi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian	100%	Bag. Ekonomi
		Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	1	Bag. Ekonomi
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	100%	Bag. Administrasi Pembangunan
		Jumlah perangkat daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	30	Bag. Administrasi Pembangunan
		Persentase pengadaan	100%	Bag. PBJ



		barang/jasa melalui LPSE		
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	100%	Bag. SDA

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, sesuai Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 didukung oleh anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 66.548.670.954,00 digunakan untuk melaksanakan tiga (3) program, dua puluh (20) Kegiatan dan sub kegiatan, berikut alokasi anggaran :

Tabel II. 2
Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No.	Program/Sasaran	Pagu	Ket.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.520.838.814	P-APBD
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 363.503.800	P-APBD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 17.950.376.424	P-APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 91.370.000	P-APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 417.830.000	P-APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 10.214.246.060	P-APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.312.499.360	P-APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.235.888.040	P-APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 6.018.798.000	P-APBD
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.003.952.350	P-APBD
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.620.473.980	P-APBD
	Penataan Organisasi	Rp. 420.864.800	P-APBD
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.871.063.000	P-APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 13.272.527.140	P-APBD
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 323.569.000	P-APBD
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.217.927.740	P-APBD
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.228.300.800	P-APBD
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 502.729.600	P-APBD



No.	Progam/Sasaran	Pagu	Ket.
1	2	3	4
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 5.755.305.000	P-APBD
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 4.605.912.000	P-APBD
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 181.921.000	P-APBD
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 656.812.000	P-APBD
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 310.660.000	P-APBD
Jumlah		Rp. 66.548.670.954	

Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel II. 3
Anggaran pada Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Anggaran
1	2	3
1	Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Rp. 47.520.838.814,00
2	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama serta daerah/lembaga	Rp. 13.272.527.140,00
3	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Rp. 5.755.305.000,00
Jumlah		Rp. 66.548.670.954,00

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari dua belas bagian, masing-masing bagian bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah digunakan sebagai cara mengukur capaian kinerja. Capaian kinerja Utama Sekretariat Daerah tersebut sebagaimana pada table dibawah ini :



Tabel II. 4
Indikator Kinerja Utama
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	Nilai/ Kataogri	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
		Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil audit dibagi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dikali 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah	Nilai/ Predikat	Hasil Survei Oleh pihak ketiga
		Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B)	Kuantitas	Jumlah Hasil Survei IKM oleh pihak Ketiga terhadap Perangkat Daerah
		Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Kuantitas	Jumlah hasil Evaluasi oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah
2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Skor LPPD	Nilai	Hasil Penilaian Kemendagri
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat	Hasil Keputusan Dewan Hakim dalam lomba MTQ
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	Jumlah produk hukum yang harmonisasi dan sinkron dibagi jumlah seluruh produk hukum dikali 100
		Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	%	Jumlah Naskah MoU yang difasilitasi dibagi total jumlah naskah MoU dikali 100%
3.	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaa fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	%	Jumlah fasilitasi dan koordinasi sector perekonomian yang dilaksanakan dibagi jumlah sector perekonomian yang direncanakan dikali 100
		Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	Kuantitas	Hasil Penilaian Mandiri Bag. Ekonomi
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu dibagi target jumlah perangkat daerah yang menyampaikan LPPK dikali 100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Nilai capaian indikator kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 100\%$	: Sangat Baik
$75\% < X \leq 100\%$	: Baik
$55\% < X < 75\%$	: Cukup Baik
$X < 55\%$	: Kurang Baik

Ket. : X = Capaian indikator Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun sebelumnya, tahun 2024, secara keseluruhan capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan peningkatan kinerja, meskipun terdapat indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh adanya kendala dipermodalan. Namun secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan “Baik” karena capaian kinerja rata rata-ratanya 100% mencapai target.

Sedangkan untuk tahun 2025 ini berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029. Setelah dilakukan pengukuran Indikator Kinerja maka didapat sejumlah indikator tersebut terapat . Hal tersebut dapat dilihat table berikut :



Tabel III.A
Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			Realisasi	Realisasi	Realisasi
			Tagret	REALISASI	Capaian	2024	2023	2022
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	80,01 (B)	81.10 (A)	101,36%	77,19 (BB)	71,74	67,77
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	93%	100%	100	100%	100%
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	86	86	100%	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu Pelayanan Minimal Baik (B)	34	38	111,76%	-	-	-
		Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	40	44	110%	-	-	-
		Nilai kematangan Perangkat Daerah	36	35	97,22%	34	30	28,1
		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	80	83,04	103,8%	-	-	-
2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Skor LPPD	3,0	2,644	88,13%	-	2,6	2,3107
		Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar	3	100%	3 Besar	2 Besar	2 Besar
		Persentase Produk Hukum daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%
		Indkes Reformasi Birokrasi Hukum	83	87.42	105,32%	-	-	-



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			Realisasi	Realisasi	Realisasi
			Tagret	REALISASI	Capaian	2024	2023	2022
		Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	100%	100%	100%	86%	80%	80%
3.	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitas, dan Optimilisasi pengelolaan sector ekonomi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	1	1	100%	-	-	-
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	100%	98%	98%	-	-	-
		Persentase pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	104%
		Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	30	29	96,66%	-	-	-
		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ket :

	Sangat Baik
	Baik
	Cukup Baik
	Kurang Baik



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

1. Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab :

Tabel III. 1 – 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi		
		Target	Capaian (%)	2025	2024	2023
1.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)	101,36%	81,10 (A)	77.19 (BB)	74,78 (BB)
2.	Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak Lanjuti	93%	100%	93%	100	100%
3.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	34	111,76%	38	-	-
4.	Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal Baik (B)	40	110%	44	-	-
5.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	36	97,22%	35	35	34
6.	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotkolan dan komunikasi pimpinan	80	103,8%	83,04	-	-

Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Diperoleh dengan cara Nilai/Predikat yang diberikan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Realisasi Indikator Kinerja yaitu 80,10 sebesar 100,11%. Dengan demikian Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala ordinal adalah masuk kategori **“Sangat Baik”**

Begitu juga dalam memudahkan interpretasi pengukuran atas capaian kinerja dipergunakan predikat nilai menurut Kemendagri adalah sebagai berikut :



Tabel III. 1-2
Predikat Tingkat AKIP

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Tabel III. 1-3
Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Status Kinerja	Sumber Data	Sumber Penilaian
Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efesien dan bertanggungjawab	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	80,01 (A)	81,10 (A)	101,36%	Memuaskan	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat

Dari table diatas disimpulkan bahwa, indicator kinerja pada Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target kinerja sebesar 80,01 (A) dengan realisasi Nilai SAKIP sebesar 81,10 (A) dengan capaian 101,36% dan status Nilai **“Memuaskan”**, sehingga dapat disampaikan target kinerja Nilai SAKIP tahun anggaran 2025 telah melebihi target. Berikut adalah table perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya.

Tabel III. 1-4
Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	2025			2024			
			Realisasi	Capaian	Status Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Status Kinerja
Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efesien dan bertanggungjawab	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	80,01 (A)	81,10 (A)	101,36 %	Memuaskan	66,50	77,19 (BB)	116,07 %	Sangat Baik



Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak Lanjuti

Selain itu Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategi dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III. 1-5
Capaian Kinerja Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak Lanjuti

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi		
		Target	Capaian (%)	2025	2024	2023
1.	Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak Lanjuti	93%	100%	93%	100%	100%

Berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yaitu pada Belanja Makan dan Minum Rapat Atas Kegiatan Internal SKPD, Belanja Bahan Bakar Minyak, Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Workshop Evaluasi Kerjasama Daerah Tahun 2024, dan Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas, telah ditindak lanjuti.

Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase temuan BPK/ISP yang ditindak lanjuti berdasarkan skala pengukuran ordinal yaitu **“Baik”**. Sehingga dapat disampaikan target kinerja persentase temuan BPK/ISP yang ditindaklanjuti mencapai target. Berikut adalah table perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya :

Tabel III. 1-6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	2025			Target	2024		
		Kinerja	Realisasi	Capaian	Status Kinerja	Kinerja	Realisasi	Capaian	Status Kinerja
Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab	Persentase Temuan BPK/ISP yang ditindak Lanjuti	93%	93%	100%	Baik	100%	100%	100%	Baik



Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)

Tabel III. 1.7

Capaian Kinerja Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)

Sasaran Strategi 1

Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2024	2025
1.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	34	111,76%	38	38

Bagian Organisasi memiliki sasaran strategi dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diperoleh dari rekapitulasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Se Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor 700.1.2/754/M/ISp/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tahun anggaran 2025.

Dari Evaluasi Laporan kinerja yang telah dilakukan pada 44 SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 13 OPD mendapat Kategori “A” (Memuaskan), 22 OPD mendapat kategori “BB” (Sangat Baik) dan 3 OPD mendapat kategori “B” (Baik). Dengan demikian mencapai target kinerja 34 Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B) realisasi capaian sebesar 111,76%, berdasarkan pengukuran skala ordinal maka capaian kinerja Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B) yaitu “Sangat Baik”.

Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal Baik (B)

Tabel III. 1-8

Capaian Kinerja Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Minimal Baik (B)

Sasaran Strategi 1

Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2024	2025
1.	Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Minimal Baik (B)	40	110%	43	44

Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Baik (B) diukur melalui pengisian kuesioner sendiri oleh responden serta wawancara tatap muka untuk memperoleh indeks



kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Target Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Baik (B) 40 perangkat daerah, Realisasi indicator kinerja yaitu 44 perangkat daerah atau sebesar 110%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“sangat baik”**.

Tabel III. 1-9

Nilai Presepsi, Nilai Interval konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Presepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh 44 perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel III. 1-10

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
1	Sekretariat Daerah	85,34	Baik	81,79	Baik
2	Sekretariat DPRD	84,6	Baik	82,71	Baik
3	Inspektorat Daerah	81,17	Baik	83,69	Baik
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,5	Baik	77,12	Baik
5	Dinas Kesehatan	86,02	Baik	88	Baik
6	Dinas Ketahanan Pangan	80,04	Baik	81,25	Baik
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,75	Baik	81,17	Baik
8	Dinas Lingkungan Hidup	78,73	Baik	80,05	Baik
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	93,69	Sangat Baik	90,08	Sangat Baik
10	Dinas Pekerjaan Umum	84,98	Baik	86,24	Baik
11	Dinas Pdam Kebakaran dan Penyelamatan	89,32	Sangat Baik	92,79	Sangat Baik
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa	82,1	Baik	83,06	Baik
13	Dinas P3KB	83,63	Baik	84,85	Baik
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	89,15	Sangat Baik	92,62	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,43	Baik	80,49	Baik
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	79,98	Baik	81,77	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93,75	Sangat Baik	83,82	Baik



18	Dinas Sosial	83,31	Baik	86,88	Baik
19	Dinas Tanman Pangan dan Hortikultura	83,05	Baik	79,67	Baik
20	Dinas Tenaga Kerja	81,88	Baik	81,24	Baik
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80,06	Baik	82,37	Baik
22	Dinas Perhubungan	81,77	Baik	81,63	Baik
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	83,42	Baik	89,29	Baik
24	Dinas Peirkanan	86,8	Baik	87,87	Baik
25	Dinas Pendapatan Daerah	82,06	Baik	82,06	Baik
26	Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	86,74	Baik	82,29	Baik
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81,94	Baik	84,58	Baik
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83,97	Baik	82,53	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,58	Baik	87,1	Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86,38	Baik	83,41	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	85,59	Baik	86,88	Baik
32	Kecamatan Batang Asam	79,2	Baik	82,7	Baik
33	Kecamatan Bram Itam	81,61	Baik	86,38	Baik
34	Kecamatan Merlung	82,07	Baik	81,02	Baik
35	Kecamatan Tebing Tinggi	86,48	Baik	86,91	Baik
36	Kecamatan Tungkal Ilir	81,57	Baik	82,85	Baik
37	Kecamatan Muara Papalik	82,5	Baik	79,84	Baik
38	Kecamatan Pengabuan	81,58	Baik	84,23	Baik
39	Kecamatan Kuala Betara	83,01	Baik	85,45	Baik
40	Kecamatan Tungkal Ulu	82,82	Baik	80,92	Baik
41	Kecamatan Betara	80,71	Baik	82,56	Baik
42	Kecamatan Renah Mendaluh	76,47	Kurang Baik	80	Baik
43	Kecamatan Seberang Kota	81,53	Baik	80,93	Baik
44	Kecamatan Senyerang	84,81	Baik	82,59	Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi

Dari Tabel perbandingan diatas pada tahun 2025 diperoleh dari 44 perangkat daerah yang disurvei, 41 perangkat daerah dinilai “Baik” oleh masyarakat dan 3 perangkat daerah mendapatkan nilai “sangat baik”.



Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Tabel III. 1.11

Capaian Kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Sasaran Strategi 1

Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2024	2025
1.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	36	97,22%	34	35

Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Diperoleh dengan total Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%. Realisasi indikator kinerja yaitu 97,22%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skla pengukuran ordinal masuk kategori **“Baik”**.

Tabel III. 1. 12

Nilai Kematangan Perangkat Daerah

NO	Skor Penilaian	Predikat (Tingkat Kematangan)
1	2	3
1.	10-19	SANGAT RENDAH
2.	19,1-28	RENDAH
3.	28,2-37	SEDANG
4.	37,1-46	TINGGI
5.	46,1-55	SANGAT TINGGI

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh skro penilaian 35 (Tiga Puluh Lima) dengan tingkat kematangan **“sedang”**. Naik berkisar satu dari hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 diperoleh nilai skor 34 dengan tingkat kematangan **“Sedang**. Berikut table perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel III. 1-13

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya



Indikator Sasaran	Target Kinerja	2024			Target Kinerja	2023		
		Realisasi	Capaian	Status Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja	Status Kinerja
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	35	34	97,14	Sedang	32	30	93,75%	Sedang

2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga:

Tabel III. 2-1

Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun		
		Renstra	Target	Realisasi	Capaian	2024	2023	2022
1.	Skor LPPD	2,64	2,64	2,644	100%	2,3T	-	-
2.	Persentase bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	-	-	-
3.	Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar	3 Besar	100%	2 Besar	2 Besar	2 Besar
No.	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun		
			Target	Realisasi	Capaian	2024	2023	2022
4	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan dan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Naskah MOU yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten

Diperoleh dengan cara Skor yang diberikan kementerian dalam Negeri atas LPPD. Relisasi Indikator kinerja tahun anggaran 2024 dan 2025 masih menunggu keputusan dari Kemendagri . target yang ditetapkan pada Tahun 2025 pada rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan hasil penilaian kementrian dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. hasil evaluasi lppd pada tahun 2025 berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yaitu 2,644 T sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan nilai capaian indicator kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal adalah masuk kategori **“baik”**.

Begitu juga dalam memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai menurut Kemendagri adalah sebagai berikut :

Tabel III. 2-2
Interval Nilai LPPD

No.	Nilai	STATUS KINERJA
1	1,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Tabel III. 2-3
Relisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Status Kinerja	Sumber Data	Sumber Penilaian
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Skor LPPD	2,64	2,644	100%	Sedang	Bagian Tata Pemerintahan	Kemendagri

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, indicator kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target kinerja sebesar 3, dengan realisasi skor kinerja LPPD sebesar 2,644 dengan capaian 88,13% dan status kinerja **“sedang”**. Sehingga dapat disampaikan target kinerja 2023 tidak mencapai target.



Tabel III. 2-4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Target Kinerja	2025			Target Kinerja	2024		
		Realisasi	Capaian	Status Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja	Status Kinerja
Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab	3,0	2,644	88,13%	Sedang	3	2,3107	77,02%	Rendah

Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi

Tabel III. 2-5
Capaian Kinerja Peringkatprestasi MTQ Tingkat Provinsi

Sasaran Strategi 2					
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Prestasi MTQ tingkat Provinsi	3	100%	3 Besar	2 Besar

Diperoleh dari hasil peringkat pada MTQ tingkat provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025 menetapkan pemenang Rangking III yaitu Kab. Tanjung Jabung Barat. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada prestasi MTQ tingkat Provinsi jambi telah mencapai target dengan skala pengukuran ordinal “Baik”.

Persentase Bantuan Hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran

Tabel III. 2-6
Capaian Kinerja Hibah Bidang Keagamaan dan Sosial yang tersalurkan

Sasaran Strategi 2					
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase Hibah Bidang Keagamaan dan Sosial yang tersalurkan	100%	100%	100%	100%



Diperoleh dengan cara jumlah hibah bidang keagamaan yang disalurkan (45) dibagi target jumlah hibah bidang keagamaan (45) yang direncanakan disalurkan kali 100. Dengan demikian indikator kinerja persentase hibah bidang keagamaan dan social yang tersalurkan mencapai target dengan capaian 100%. Berdasarkan hasil pengukuran skala ordinal yaitu **“Baik”**.

Hibah tahun anggaran 2025 pada bagian Kesejahteraan Rakyat disalurkan pada bidang pendidikan keagamaan sebanyak 12 Madrasah Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sarana ibadah sebanyak 33 Masjid di Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Majelis Ulama Indonesia, Badan Amal Zakat Nasional dan Persatuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia.

Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan dan perundang-undangan

Tabel III. 2-7

Capaian Kinerja Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan dan Perundang-undangan

Sasaran Strategi 2					
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan dan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%

Diperoleh dengan cara Jumlah Produk Hukum yang harmonisasi dan sinkron dibagi jumlah seluruh Produk Hukum yang dievaluasi dikali 100. Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang diharmonisasi dan sinkron (51 Dokumen) dibagi target peraturan daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (51 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“baik”**.

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang



telah berlaku dimasyarakat. Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Adapun isu strategis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Kekurangansiapan SDM dalam penyusunan Produk Hukum pada Perangkat Daerah pemarkarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum

Tabel III. 2-8
Perda Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NOMOR PERBUP	TENTANG	BERITADAERAH (LD)	SKPD PENGUSUNG
1	2	3	4
1 TAHUN 2025	PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGH SILAN RENDAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 1 Ditetapkan Tanggal 13 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 13 JANUARI 2025	BAPENNDA
2 TAHUN 2025	PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDA	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 2 Ditetapkan Tanggal 13 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 13 JANUARI 2025	BAPENNDA
3 TAHUN 2025	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 3 Ditetapkan Tanggal 17 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 17 JANUARI 2025	BKAD
4 TAHUN 2025	TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 4 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	DINKES
5 TAHUN 2025	PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 5 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	DINKES
6 TAHUN 2025	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 6 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	BAPPENDA
7 TAHUN 2025	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 7 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	BAPPENDA
8 TAHUN 2025	TATA CARA PEMUGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 8 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	BAPPENDA
9 TAHUN 2025	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN ATAS HAK TANAH DAN BANGUNAN	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 9 Ditetapkan Tanggal 31 JANUARI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JANUARI 2025	BAPPENDA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025

NOMOR PERBUP	TENTANG	BERITADAERAH (LD)	SKPD PENGUSUNG
1	2	3	4
10 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 10 Ditetapkan Tanggal 17 FEBRUARI 2025 Diundangkan Tanggal 18 FEBRUARI 2025	BKAD
11 TAHUN 2025	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 11 Ditetapkan Tanggal 14 Maret 2025 Diundangkan Tanggal 14 Maret 2025	BKAD
12 TAHUN 2025	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 12 Ditetapkan Tanggal 19 Maret 2025 Diundangkan Tanggal 19 Maret 2025	PMD
13 TAHUN 2025	PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 13 Ditetapkan Tanggal 08 April 2025 Diundangkan Tanggal 08 April 2025	BKAD
14 TAHUN 2025	PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 14 Ditetapkan Tanggal 08 April 2025 Diundangkan Tanggal 08 April 2025	DIKBUD
15 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 15 Ditetapkan Tanggal 02 Juni 2025 Diundangkan Tanggal 02 Juni 2025	BAPPEDA
16 TAHUN 2025	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 16 Ditetapkan Tanggal 30 Juni 2025 Diundangkan Tanggal 30 Juni 2025	BAPPEDA
17 TAHUN 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 17 Ditetapkan Tanggal 04 JULI 2025 Diundangkan Tanggal 04 JULI 2025	BKAD
18 TAHUN 2025	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 18 Ditetapkan Tanggal 23 JULI 2025 Diundangkan Tanggal 23 JULI 2025	BKAD
19 TAHUN 2025	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BRAM ITAM KIRI TAHUN 2025-2045	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 19 Ditetapkan Tanggal 29 JULI 2025 Diundangkan Tanggal 29 JULI 2025	PU
20 TAHUN 2025	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN HALLO USTAD SEBAGAI UNIT SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU KEDARURATAN 112	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 19 Ditetapkan Tanggal 31 JULI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JULI 2025	Kominfo
21 TAHUN 2025	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 21 Ditetapkan Tanggal 31 JULI 2025 Diundangkan Tanggal 31 JULI 2025	BAPERIDA
22 TAHUN 2025	SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 22 Ditetapkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025 Diundangkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025	BKPSDM



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025

NOMOR PERBUP	TENTANG	BERITADAERAH (LD)	SKPD PENGUSUNG
1	2	3	4
23 TAHUN 2025	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, DAN LEMBAGA ADAT DESA	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 23 Ditetapkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025 Diundangkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025	BKAD
24 TAHUN 2025	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 24 Ditetapkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025 Diundangkan Tanggal 11 AGUSTUS 2025	BKAD
25 TAHUN 2025	PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 25 Ditetapkan Tanggal 19 SEPTEMBER 2025 Diundangkan Tanggal 19 SEPTEMBER 2025	BAPERIDA
26 TAHUN 2025	STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 26 Ditetapkan Tanggal 07 OKTOBER 2025 Diundangkan Tanggal 07 OKTOBER 2025	BKAD
27 TAHUN 2025	PENJABARAN APBDP	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 27 Ditetapkan Tanggal 10 OKTOBER 2025 Diundangkan Tanggal 10 OKTOBER 2025	BKAD
28 TAHUN 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN KECIL	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 28 Ditetapkan Tanggal 10 OKTOBER 2025 Diundangkan Tanggal 10 OKTOBER 2025	DINSOS
29 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 29 Ditetapkan Tanggal 17 OKTOBER 2025 Diundangkan Tanggal 17 OKTOBER 2025	PMD
30 TAHUN 2025	MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 29 Ditetapkan Tanggal 10 NOVEMBER 2025 Diundangkan Tanggal 10 NOVEMBER 2025	BKPSDM
31 TAHUN 2025	KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 31 Ditetapkan Tanggal 25 NOVEMBER 2025 Diundangkan Tanggal 25 NOVEMBER 2025	PBJ
32 TAHUN 2025	JAMINAN SOSIAL PERKEBUNAN	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 32 Ditetapkan Tanggal 25 NOVEMBER 2025 Diundangkan Tanggal 25 NOVEMBER 2025	PERKEBUNAN
33 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 33 Ditetapkan Tanggal 3 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 3 Desember 2025	ORGANISASI
34 TAHUN 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 34 Ditetapkan Tanggal 11 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 11 Desember 2025	KERJA SAMA
35 TAHUN 2025	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 35 Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 12 Desember 2025	BKAD
36 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 36 Ditetapkan Tanggal 22 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 22 Desember 2025	EKONOMI



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025

37 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 37 Ditetapkan Tanggal 22 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 22 Desember 2025	NAKER
38 TAHUN 2025	PENJABARAN APBD 2026	BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 38 Ditetapkan Tanggal 30 Desember 2025 Diundangkan Tanggal 30 Desember 2025	BKAD

NOMOR PERDA	TENTANG	LEMBARAN DAERAH (LD)	TAMBAHAN BERITA DAERAH (TBD)	SKPD PENGUSUNG
1 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 1 DITETAPKAN TANGGAL DIUNDANGKAN TANGGAL	TAMBAHAN LD NOMOR 1 NO REG : (1- 10/2025)	DISPARPORA
2 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 2 DITETAPKAN TANGGAL DIUNDANGKAN TANGGAL	NO REG : (2- 11/2025)	DISNAKERTRANS
3 TAHUN 2025	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 3 DITETAPKAN TANGGAL 14 Juli 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 14 Juli 2025	NO REG : (3- 12/2025)	Bagian Organisasi Setda
4 TAHUN 2025	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 4 DITETAPKAN TANGGAL 19 Agustus 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 19 Agustus 2025		BKAD
5 TAHUN 2025	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 5 DITETAPKAN TANGGAL 20 Agustus 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 20 Agustus 2025	NOREG : (6- 30/2025) TAMBAHAN LD NOMOR 2	BAPPEDA
6 TAHUN 2025	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2045	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 6 DITETAPKAN TANGGAL 1 OKTOBER 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 1 OKTOBER 2025	NOREG : (4-22/2025)	KOPPERINDAG
7 TAHUN 2025	PERUBAHAN APBDP	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 7 DITETAPKAN TANGGAL 10 OKTOBER 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 10 OKTOBER 2025		BKAD
8 TAHUN 2025	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM BENTUK	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 8 DITETAPKAN TANGGAL 24	NOREG :) TAMBAHAN LD NOMOR 3	



	BARANG MILIK DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA)	November 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 24 November 2925		
9 TAHUN 2025	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PT. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENGABUAN (PERUMDA)	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 9 DITETAPKAN TANGGAL 3 Desember 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 3 Desember 2025	NO REG : (8- 72/2025)	
10 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTUKSI	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 10 DITETAPKAN TANGGAL 3 Desember 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 3 Desember 2025	NO REG : (9- 73/2025)	
11 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 11 DITETAPKAN TANGGAL 3 Desember 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 3 Desember 2025	NO REG : (10- 74/2025)	
12 TAHUN 2025	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 12 DITETAPKAN TANGGAL 3 Desember 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 3 Desember 2025	NO REG : (12- 76/2025) TAMBAHAN LD NO	
13 TAHUN 2025	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	LEMBARAN DAERAH TAHUN 2025 NOMOR 13 DITETAPKAN TANGGAL 30 Desember 2025 DIUNDANGKAN TANGGAL 30 Desember 2025	NO REG : (13- 101/2025)	BKAD

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan dan Perundang-undangan adalah belum Optimalnya tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Sumber Daya Manusia yang terdapat pada bagian Hukum Sekretariat Daerah dan kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

Tabel III. 2-9
Capaian Indikator

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Produk Hukum yang dibuat	Persentase	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Kasus Litigasi yang diFasilitasi	Kasus	2	2	2	100%



3	Persentase Nasakah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan dan yang dipublikasikan	Persentase	100%	100%	100%	100%
---	---	------------	------	------	------	------

Solusi dari kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Kementerian Teknis;
2. Pengajuan usulan penambahan personil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan usulan keikutsertaan dalam peningkatan kemampuan penyusun produk hukum.

Indeks Reformasi Hukum

Tabel III. 2-10
Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Hukum

Sasaran Strategi 2					
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	83	105,32%	87.42	100%

Diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Atas Indeks Reformasi Birokrasi Hukum oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan nilai sebesar 87.42. Capaian yang diperoleh sebesar 105,32% dengan target 83. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“sangat baik”**.

Interval Nilai Indeks Reformasi Hukum

Nilai	Kategori
>90-100	Istimewa (AA)
>80-90	Memuaskan (A)
>70-80	Sangat Baik (BB)
>60-70	Baik (B)
>50-60	Cukup (CC)
>30 -50	Kurang (D)

Berdasarkan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Nomor PPH-OT.03.01-282 pada Tanggal 13 Oktober 2025 telah disimpulkan hasil Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah 87.42, dengan kategori **A (Sangat Baik)**.



Persentase Naskah MOU yang difasilitasi

Tabel III. 2-11

Capaian Kinerja Prersentase Naskah MoU yang difasilitasi

Sasaran Strategi 2					
Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%

Diperoleh dengan cara Jumlah Naskah MoU yang difasilitasi dibagi jumlah Naskah MoU dikali 100. Capaiannya diukur dari jumlah Naskah MoU yang difasilitasi (20 Dokumen) dibagi jumlah Naskah MoU (20 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“baik”**.

Pada Bagian Kerjasama memiliki peran untuk memfasilitasi Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun kerjasama yang difasilitasi yaitu kerjasama sinergi, kerjasama dengan pihak ketiga, Kerjasama Daerah dengan daerah lain, adapun kerjasama daerah dengan daerah lain dibagi menjadi dua yaitu kerja sama wajib dan sukarela.

Tabel III. 2-12

Ringkasan Kerjasama yang Difasilitasi

No.	Kerjasama yang difasilitasi	Jumlah	Keterangan
1	Kerjasama Sinergi	8	
2	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	47	
3	Kerjasama dengan daerah Lain		
	Wajib	16	
	Sukarela	2	

3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan :



Tabel III. 3-1

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun		
		Renstra	Target	Realisasi	Capaian	2024	2023	2022
1	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	1	1	1	100%	1	1	1
3	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	75%	75%	59%	78%	-	-	-
4	Jumlah perangkat daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	30	30	29	96,66%	-	-	-
5	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%
6	Persentase koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian

Tabel III. 3-2

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Fasilitas Dan Koordinasi Sector Perekonomian

Sasaran Strategi 2					
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian	100%	100%	100%	100%

Diperoleh dari jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektro perekonomian yang direncanakan dikali 100%.



Hasil capaian indikator Persentase pelaksanaan faisлитas dan koordinasi sector perekonomian yaitu sebesar 100% hal ini berarti telah mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran skala ordinal yaitu “Baik”.

Fasilitasi dan koordinasi sector ekonomi merupakan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui fasilitas pemerintah dan pemangku kepentingan dengan menyediakan dukungan kebijakan, pendampingan serta adanya pemberian subsidi terhadap perusahaan daerah. Koordinasi sector ekonomi dilakukan secara lintas sector untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ekonomi.

Diantara fasilitasi dan koordinasi sector ekonomi pada bagian perekonomian yaitu secara rutin melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembahasan Pertumbuhan ekonomi, evaluasi dukungan 3 juta rumah, dan memantau ketersediaan dan harga bahan pokok bersama Menteri Dalam Negeri melalui Zoom Meeting.

Tabel III. 3-3
Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	2025			Target Kinerja	2024		
			Realisasi	Capaian	Status Kinerja		Realisasi	Capaian	Status Kinerja
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Persentase pelaksanaan faisлитas dan koordinasi sector perekonomian	100%	100%	100%	Baik	100%	100%	100%	Baik

Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik

Tabel III. 3-4
Capaian Kinerja Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik

Sasaran Strategi 2					
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	1	100%	1	100%

BUMD dalam kondisi baik yaitu BPR Tanggorajo yang secara struktur organisasi telah terpenuhi. BPR juga telah berkontribusi kepada daerah dengan memperoleh deviden sebesar



Rp. 1.082.877.248 pada tahun buku 2024. Indikator jumlah BUMD dalam kondisi baik telah mencapai target dengan capaian 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinal yaitu **“baik”**.

Tabel III. 3-5

Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu

Sasaran Strategi 2					
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	100%	97,72%	97,72%	-

Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu

Diperoleh dari dari Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu dibagi target jumlah perangkat daerah yang wajib menyampaikan LPPK dikali 100%. hasil capaian realisasi sebesar 97,72% dari target 100%. Berdasarkan skala ordinal **“Baik”**.

Tabel III. 3-6

Capaian Kinerja Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

Sasaran Strategi 2					
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	100%

Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

Diperoleh dengan cara jumlah OPD yang mengadakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan atau melalui LPSE dibagi jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui LPSE dikali 100.



Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Rencana Umum Pegadaan (SIRUP) Tahun 2025 terdapat 5.295 paket penyedia dan 2.056 Paket Swakelola yang telah diumumkan oleh Perangkat Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta Peraturan Perubahannya yaitu Tender, Tender cepat, Pengadaan Langsung, E-Purchasing dan Penunjukan Langsung. Berdasarkan rekapitulasi proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diperoleh dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa menurut metode pemilihan sebagai berikut :

1. Tender : 331 Paket
2. Tender cepat : 0 (nol) Paket
3. Pengadaan langsung : 1.411 Paket
4. E- Purchasing : 3.957 Paket
5. Penunjukan Langsung : 0 (nol) paket

Persentase jumlah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE untuk tahun anggaran 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Sehingga diperoleh capaian kinerja berdasarkan skala ordinal masuk kategori **“Baik”**.

Tabel III. 3-3
Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	2025			Target Kinerja	2024		
			Realisasi	Capaian	Status Kinerja		Realisasi	Capaian	Status Kinerja
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	Baik	1000	100%	100%	Baik



Tabel III. 3-7
Capaian Kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan berkelanjutan

Sasaran Strategi 2					
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sector ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi	
		Target	Capaian (%)	2025	2024
1	Persentase koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%

Persentase koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Diperoleh dari hasil jumlah koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Alam dibagi target dikali 100. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“Baik”**.

Adapun koordinasi dan fasilitasi pada bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Rekomendasi** terhadap 33 izin pertambangan yang sudah diterbitkan provinsi dan 17 izin sudah tahap produksi, 6 yang sudah mendapatkan Persetujuan RKAB, 11 yang belum mendapatkan persetujuan RKAB, agar pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan dinas ESDM Provinsi Jambi dan Inspektur Tambang Kementerian ESDM Jambi untuk melakukan evaluasi dan penghentian sementara kegiatan pertambangan

Tindak Lanjut :

Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Bagian Sumber Daya Alam telah menyurati Gubernur Jambi terkait kegiatan Pertambangan melalui surat Nomor : 500.10.2.3/616/BUPATI.V/SDA/2025 tanggal 14 Mei 2025 Hal Laporan Kegiatan Pertambangan Batuan yang menyebabkan Banjir di Kecamatan Batang Asam. disamping itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi bersama-sama dengan anggota DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat terkait kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. **Rekomendasi** Camat Tungkal Ilir perlunya penanganan masalah perkotaan, yakni masalah pedagang kaki lima, sampah, got, banjir akibat pasang , dan masalah listrik di Desa Tungkal I.



Tindak lanjut Berdasarkan Surat dari Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Jambi Nomor 0044/DIS.01.01/F11080000/2025 tanggal 22 Oktober 2025 bahwa pembangunan Lides di Desa Tungkal I dalam Proses pembangunan yang dilaksanakan dari bulan November 2025 sampai akhir Februari 2026.

3. **Rekomendasi** Camat Batang Asam Penanganan Isu Lingkungan, Terutama Banjir Di Musim Hujan Akibat Pertambangan dan Kebakaran Hutan di Musim Panas, Perbaikan Jembatan Lubuk Bernai dan Peningkatan Jalan dan Sinyal Internet di Desa Rawa Kempas.

Tindak lanjut Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan surat terkait permasalahan banjir akibat aktivitas pertambangan kepada Gubernur Jambi melalui Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 500.10.2.3/616/BUPATI.V/ SDA/2025 tanggal 14 Mei 2025 Hal Laporan Kegiatan Pertambangan Batuan yang menyebabkan Banjir di Kecamatan Batang Asam.

Terhadap laporan Bupati Tanjung Jabung Barat tersebut, telah dilakukan pengecekan lapangan yang diikuti oleh:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi,
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat;
5. Kecamatan Batang Asam Kab. Tanjab Barat;
6. Inspektur Tambang Kementerian ESDM Penempatan Provinsi Jambi.

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tim terpadu serta wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat bahwa banjir yang terjadi bukan merupakan banjir bandang, akan tetapi banjir ini merupakan banjir luapan sungai yang rutin terjadi sepanjang tahun dengan frekuensi 3-4 kali dalam setahun.
2. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tim terpadu serta wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat bahwa banjir yang terjadi bukan merupakan banjir bandang, akan tetapi banjir ini merupakan banjir luapan sungai yang rutin terjadi sepanjang tahun dengan frekuensi 3-4 kali dalam setahun.
3. Terjadinya pendangkalan pada anak Sungai Tantang (Sungai Kayu Kawan) lokasi terjadinya banjir luapan sungai pada koordinat -1.072214 LS 102.968904 BT sehingga perlu dilakukan normalisasi sungai tersebut.



4. Pelaksanaan pengelolaan air dari aktivitas tambang pada settling pond belum optimal karena tidak sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui,
5. Kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman di sempadan sungai belum maksimal sesuai dengan dokumen lingkungan.
6. Terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar wilayah terdampak dilarang melakukan kegiatan pertambangan kecuali kegiatan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan sebelum mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahap Kegiatan Eksplorasi atau RKAB Tahap Kegiatan Operasi Produksi.
7. Terhadap pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum mendapatkan Persetujuan Rencana Penambangan.
8. Belum dilakukan kajian geoteknik (kestabilan lereng) serta belum optimalnya sistem penirisan dan penyaliran tambang.
9. Agar pihak perusahaan melakukan pencegahan dan meminimalkan perubahan lingkungan hidup salah satunya berupa koordinasi secara rutin dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitar.
10. Aktivitas pertambangan di sekitar wilayah terdampak, dapat berpotensi membawa material lumpur pada saat hujan dengan intensitas tinggi, tetapi tidak menjadi penyebab utama banjir.

C. AKUNTABILITAS KEAUNGAN

Serapan anggaran seluruh program yang mendukung keseluruhan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebanyak 3 Sasaran Strategis adalah sebesar 91,22% yakni jumlah yang terealisasi adalah Rp. 60.702.662.959,- dari total pagu Rp. 66.548.670.954. dari hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. III.B.1

**Realisasi Program/Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024**

No.	Progam/Sasaran	Pagu	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.520.838.814	Rp. 43.181.548.314	90,86%
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab			



	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 363.503.800	Rp. 342.943.000,	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 17.950.376.424	Rp. 16.563.309.030	
	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 91.370.000	Rp. 91.170.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 417.830.000	Rp. 417.527.648	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 10.214.246.060	Rp. 9.565.799.365	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.312.499.360	Rp. 2.211.154.999	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.235.888.040	Rp. 4.063.052.261	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 6.018.798.000	Rp. 4.424.247.405	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.003.952.350	Rp. 897.657.194	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.620.473.980	Rp. 2.368.033.252	
	Penataan Organisasi	Rp. 420.864.800	Rp.380.934.250	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.871.063.000	Rp. 1.855.719.910	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 13.272.527.140	Rp. 11.870.340.845	89,41%
	1 Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama serta daerah/lembaga			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 323.569.000	Rp. 215.633.400	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.217.927.740	Rp. 9.942.821.723	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.228.300.800	Rp. 1.228.234.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 502.729.600	Rp. 483.651.722	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 5.755.305.000	Rp. 5.650.773.800	98,18%
	1 Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 4.605.912.000	Rp. 4.546.349.600	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 181.921.000	Rp. 176.928.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 656.812.000	Rp. 641.561.200	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 310.660.000	Rp. 285.935.000	
	Jumlah	Rp. 66.548.670.954	Rp. 60.702.662.959	91,22%

Seluruh bagian dilingkup Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab masing-masing dengan indicator sasaran strategisnya. Serapan anggaran pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang mendukung keseluruhan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :



Tabel. III.B-2
Realisasi Anggaran PerBagian Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Serapan
1	Bagian Umum	Rp. 19.776.050.440	Rp. 17.336.329.118	87,66%
2	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp. 25.452.887.574	Rp. 23.608.565.036	92,75%
3	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 11.217.927.740	Rp. 9.942.821.723	88,63%
4	Bagian Hukum	Rp. 1.228.300.800	Rp. 1.228.234.000	99,99%
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 181.921.000	Rp. 176.928.000	97,26%
6	Bagian Tata Pemerintahan	Rp. 323.569.000	Rp. 215.633.400	66,64%
7	Bagian Organisasi	Rp. 420.864.800	Rp.380.934.250	90,51%
8	Bagian Sumber Daya Alam	Rp. 310.660.000	Rp. 285.935.000	92,04%
9	Bagian Perekonomian	Rp. 4.605.912.000	Rp. 4.546.349.600	98,71%
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.871.063.000	Rp. 1.855.719.910	99,18%
11	Bagian Kerja sama	Rp. 502.729.600	Rp. 483.651.722	96,21%
12	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Rp. 656.812.000	Rp. 641.561.200	97,68%
	J U M L A H	66.548.670.954,00	60.702.662.959,00	91,22

Di sisi lainnya, anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah efisien. Pada realisasi anggaran yakni sebesar 91,22% (Rp. 60.702.662.959 dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.548.670.954,-) maka tingkat efisien dalam penggunaan anggaran adalah 8,78%. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel. III.B-3.
Tingkat Efisiensi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

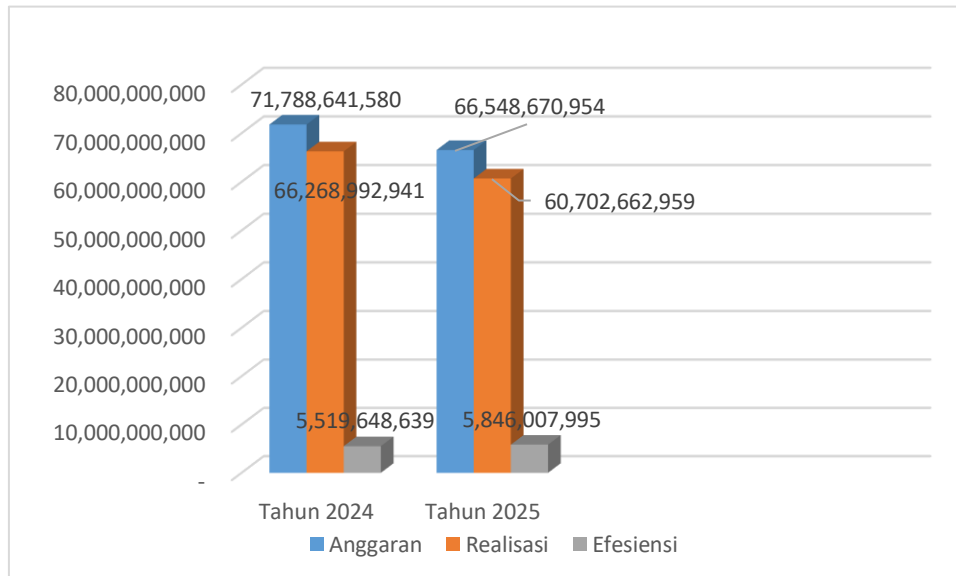
No.	Progam/Sasaran	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.520.838.814	Rp. 43.181.548.314	Rp. 4.339.290.500	8,417%
	1. Terwujudnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab				
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 363.503.800	Rp. 342.943.000,	Rp. 20.560.800,	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 17.950.376.424	Rp. 16.563.309.030	Rp. 1.387.067.394,-	
	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 91.370.000	Rp. 91.170.000	Rp. 200.000,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 417.830.000	Rp. 417.527.648	Rp. 302.352,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 10.214.246.060	Rp. 9.565.799.365	Rp. 648.446.695,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.312.499.360	Rp. 2.211.154.999	Rp. 101.344.361,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.235.888.040	Rp. 4.063.052.261	Rp. 172.835.779,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 6.018.798.000	Rp. 4.424.247.405	Rp. 1.594.550.595,-	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.003.952.350	Rp. 897.657.194	Rp. 106.295.156.-	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.620.473.980	Rp. 2.368.033.252	Rp.252.440.728,-	
	Penataan Organisasi	Rp. 420.864.800	Rp.380.934.250	Rp. 39.930.550,-	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.871.063.000	Rp. 1.855.719.910	Rp.15.316.090,-	



No.	Progam/Sasaran		Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Efesiensi (%)
1	2		3	4	5	6
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Rp. 13.272.527.140	Rp. 11.870.340.845	Rp. 1.402.186.295	10,56%
	1	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama serta daerah/lembaga				
	Administrasi Tata Pemerintahan		Rp. 323.569.000	Rp. 215.633.400	Rp. 107.935.600,-	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Rp. 11.217.927.740	Rp. 9.942.821.723	Rp. 1.275.106.017,-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Rp. 1.228.300.800	Rp. 1.228.234.000	Rp. 66.800,-	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Rp. 502.729.600	Rp. 483.651.722	Rp. 19.077.878,-	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan		Rp. 5.755.305.000	Rp. 5.650.773.800	Rp. 104.531.200,-	1,81%
	1	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Rp. 4.605.912.000	Rp. 4.546.349.600	Rp. 59.562.400,-	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rp. 181.921.000	Rp. 176.928.000	Rp. 4.993.000,-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp. 656.812.000	Rp. 641.561.200	Rp. 15.250.800,-	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Rp. 310.660.000	Rp. 285.935.000	Rp. 24.725.000,-	
Jumlah			Rp. 66.548.670.954	Rp. 60.702.662.959	Rp. 5.952.607.995	8,94%



Diagram Perbandingan Tahun Anggaran 2025 dengan sebelumnya



Dibanding realisasi anggaran program Tahun 2024 sebesar Rp. 71.788.641.580,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.268.992.941,00 atau sebesar 92,31% maka tingkat efesien dalam penggunaan anggaran adalah 7,79%, realisasi pada tahun 2025 Rp. 60.702.662.959 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.548.670.954 atau sebesar 91,22% atau efesiensi sebesar 8,94%. Hal ini menunjukkan angka efesien menurun dari tahun 2024. Namun realisasi tersebut sama-sama menunjukkan efisiensi penggunaan dana dari tahun sebelumnya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Penilaian kinerja tahun 2025 terdapat acuan dalam menghitung Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 050/ /SETDA/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Adapun pencapaian dari dua (2) Sasaran Strategis dan lima belas (15) Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 secara umum telah termasuk kategori **“baik”** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,32%
- c. Terdapat lima (5) indikator dengan kategori **“sangat baik”** yakni sebagai berikut :
 1. Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu Pelayanan Baik (B) Pada bagian organisasi ;
 2. Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Baik (B) Pada bagian organisasi;
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah;
 4. Dan Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum.
 5. Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan.
- d. Terdapat tiga (3) indikator yang tidak mencapai target Namun, secara pengukuran ordinal masih dalam kategori baik yaitu :
 1. Bagian Organisasi dengan Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan LPPK tepat waktu dan Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya diatas 90%.
- e. Terdapat sebelas (11) indikator kinerja yang termasuk **“baik”** yaitu
 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang/jasa melalui LPSE
 3. Bagian Kerjasama Persentase Naskah MoU yang difasilitasi
 4. Bagian Hukum Persentase Produk Hukum daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan
 5. Bagian Kesra Prestasi MTQ Tingkat Provinsi
 6. Bagian Sumber Daya Alam Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan



7. Bagian Ekonomi, Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sector perekonomian dan Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik
 8. Bagian Umum, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penilaian Sekretariat Daerah
 9. Bagian Tata Pemerintahan, Skor LPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- f. Kendala dan permasalahan pada indikator kinerja yang memiliki capaian antara lain :
- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - Perubahan sistem birokrasi menjadi penyederhanaan birokrasi sehingga mengubah sistem struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi di masing-masing unit kerja/biro di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga terdapat perbedaan dalam dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya;

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi pada indikator kinerja dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyajian data serta penguatan komitmen, sehingga tercapai integrasi antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemenuhan dan meningkatkan sumber daya manusia di setiap bagian di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Memperbaiki cara menetapkan realisasi agar selaras dengan operasional perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bagian yang berubah diakibatkan perubahan kebijakan perundang-undangan.

Kuala Tungkal,

2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19820411 200112 1 001